



Gaji PNS Naik

- Gaji terendah golongan II/a masa kerja 0 tahun
Rp1.560.800 (sebelumnya Rp1.486.500).
- Gaji tertinggi golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun
Rp5.901.200 (sebelumnya Rp 5.620.300).
- PNS golongan II/a masa kerja 0 tahun, terendah
Rp2.022.200 (sebelumnya Rp1.926.000);
Tertinggi III/d masa kerja 33 tahun Rp3.820.000 (sebelumnya Rp 3.638.200).
- Golongan III/a masa kerja 0 tahun, terendah
Rp2.579.400 (sebelumnya Rp2.456.700);
Tertinggi III/d masa kerja 32 tahun Rp4.797.000 (sebelumnya Rp 4.568.000).
- PNS golongan IV/a masa kerja 0 tahun, terendah
Rp3.044.300 (sebelumnya Rp2.899.500);
Tertinggi IV/e masa kerja 32 tahun Rp5.901.200 (sebelumnya Rp5.620.300).

PNS Terima Rapelan Kenaikan Gaji

YOGYA, TRIBUN - PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tampak lebih sumringah per 1 April 2019, kemarin. Pasalnya, mereka telah menerima gaji April beserta kenaikan gaji 5 persen, serta rapelan kenaikan gaji Januari hingga Maret.

Seorang PNS di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, selama 19 tahun mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat, kenaikan gaji telah beberapa kali ia rasakan. Hanya saja, besarnya tidak signifikan, melainkan bertahap.

"Kenaikan gaji pokok ini memang hal baru setelah 4 tahun tidak ada kenaikan," ujarnya ketika diwawancarai reporter *Tribun Jogja*, Senin (1/4).

Ia pun menuturkan bahwa gaji pokok PNS, TNI, Polri, besarnya hampir sama di seluruh Indonesia.

Pembedanya adalah tunjangan kinerja satu instansi dan yang lain berbeda. Misalkan instansi daerah di DKI Jakarta, Kota Surabaya, bisa berbeda dengan Yogyakarta. "Jadi gaji pokok pasti sama, tapi *take home pay* bisa berbeda," bebernya.

Ia mengaku telah menerima kenaikan gaji April beserta rapelan kenaikan gaji dari Januari hingga Maret. Disinggung mengenai rencana penggunaan tambahan pendapatan tersebut, ia akan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kenaikannya hanya sekitar Rp200 ribu saja. Tapi tetap bersyukur. Penggunaanya biasa saja karena inflasi kan juga sekitar 3-5 persen. Jadi impas untuk menyesuaikan kenaikan harga," tandasnya lantang tertawa.

● ke halaman 7

PNS Terima Rapelan Kenaikan

• Sambungan Hal 1

Sementara itu, seorang PNS Golongan IV A di Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, menjelaskan, dirinya mendapatkan kenaikan gaji Rp200 ribu. Sementara untuk PNS yang ada di golongan III berkisar Rp150 ribu.

"Lumayan ada kenaikan gaji 5 persen. Cukup membantu membiayai sekolah anak. Anak saya 3 orang, ada yang kuliah, ada yang SMA, dan ada yang masih SD," beber pria yang juga meminta namanya tak disebutkan.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, mengatakan, kenaikan gaji akan diberikan pada PNS Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada April.

"Jadi April itu yang diterimakan adalah gaji yang baru dengan tambahan 5 persen dari gaji pokok," ungkapnya.

Ia menambahkan, hanya gaji pokok yang bertambah sementara untuk tunjangan masih tetap. Adapun dengan adanya penambahan gaji pegawai, dikatakan Kadri tidak menjadi beban anggaran yang ada.

"Pertimbangan adanya kenaikan gaji sudah dibahas sejak 2018, sehingga kami anggarkan untuk APBD

2019," ucapnya.

Kadri menyebut saat ini gaji pegawai dalam anggaran yang ada sebanyak Rp23 miliar, sementara kenaikan 5 persen dari gaji pokok yakni sejumlah Rp1,1 miliar.

Terkait besaran, Kadri menjelaskan, PNS satu dengan yang lain mendapatkan tambahan berbeda karena memperhatikan faktor lama kerja serta jabatan.

"Tidak besar karena hanya 5 persen dari gaji pokok, tidak beserta tunjangan lain. Kenaikan gaji sudah lama tidak ada. Kenaikan gaji yang terakhir sekitar lima tahun lalu," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak kalang kabut menyikapi kenaikan gaji PNS.

Ia mengatakan, isu kenaikan gaji telah lama beredar namun belum ada kepastian waktu, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta telahancang-ancang mempersiapkan diri ketika sewaktu-waktu pemerintah pusat mengetuk palu atas kebijakan tersebut.

"Kota sudah siap. Bukan hanya memperhitungkan kenaikan gaji, namun juga penambahan pegawai non-PNS untuk memperkuat fungsi pelayanan kepada masyarakat," bebernya.

Ia pun berpesan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta agar lebih baik dalam melayani masyarakat.

"Selain kenaikan gaji

pokok, mereka juga ada TPP (Tunjangan Tambahan Penghasilan) yang bisa meningkatkan pendapatan mereka bila memiliki kinerja baik. Masyarakat nantinya akan merasa bahwa anggaran yang diberikan pada PNS ini membawa dampak terhadap perbaikan kinerja PNS," tandasnya.

Kesejahteraan PNS

Perlu diketahui, kenaikan gaji mulai berlaku setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta kesejahteraan PNS, pemerintah memandang perlu menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil.

Pencairan kenaikan gaji ini berlaku untuk periode Januari-April. Pembayaran kenaikan gaji 5% dirapel dari awal tahun.

"Iya, karena UU APBN untuk Januari, jadi meskipun pencairannya pada April, itu menyangkut dari Januari-April. Untuk Mei dan selanjutnya dibayarkan waktu pembayaran gajinya," kata kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai acara Apresiasi dan penghargaan wajib pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tahun 2019, Jakarta, Rabu (13/3) lalu. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005